



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI VI DPR RI
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN DIREKTUR UTAMA
PT TASPEN (PERSERO)**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 21 (Dua Puluh Satu)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : Pukul 15.17 s.d. 17.13 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Gedung Nusantara I Lt. 1
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Aria Bima
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PDIP)
- Acara : 1. Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023;
2. Rencana Kerja Korporasi Tahun 2025; dan
3. Lain-lain
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
19 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDIP)**
5 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima
 2. Adisatrya Suryo Sulisto
 3. Rieke Diah Pitaloka
 4. ST. Ananta Wahana, S.H., M.H.
 5. Sondang Tiar Debora Tampubolon
 - 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)**
3 dari 8 orang Anggota
 1. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
 2. Trifena M. Tinal, B. SC.
 3. Drs. H. Dadang S. Muchtar
 - 3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA (F-P. GERINDRA)**
4 dari 8 orang Anggota

1. Khilmi
2. Ir. H. La Tinro La Tunrung
3. M. Husein Fadlulloh, B. Bus., M.M., M.B.A.
4. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)

3 dari 6 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.
3. H. Subardi, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

0 dari 6 orang Anggota

-

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

2 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. Herman Khaeron, M.Si.
2. Muslim SHI., M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

1 dari 4 orang Anggota

1. Hj. Nevi Zuairina

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

1 dari 4 orang Anggota

1. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota

-

B. UNDANGAN:

Plt. Direktur Utama PT Taspen (Rony Hanityo Aprianto) beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Taspen (Persero), Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, Senin 24 Juni 2024.



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya, dan
Salam kebajikan,

**Yang saya hormati Kawan-kawan Anggota Komisi VI DPR RI,
Plt. Direktur Utama dan Direktur Investasi PT Taspen (Persero), Saudara
Rony Hanityo Aprianto, beserta
Seluruh jajarannya yang hadir,**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa taala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan PLT Direktur Utama PT Taspen pada hari ini tentunya dalam keadaan sehat *walafiat*.

Bapak-Ibu dan Hadirin yang saya muliakan,

Saya akan membuka rapat hari ini. Untuk memulai rapat, nanti pengambilan kesimpulan rapat kita akan tunggu sampai kawan-kawan bisa kuorum anggota, untuk kuorum fraksi telah terpenuhi. Maka dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.17 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Kami ingin rapat untuk siang hari ini, kita akan selesai maksimal pukul 17.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Plt. Direktur Utama dan Direktur Investasi PT Taspen atas kesediaan waktunya menghadiri rapat dengar pendapat pada hari ini, dan sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat hari ini untuk membahas tentang evaluasi kinerja korporasi 2023 dan yang lain-lainnya.

Seperti kita ketahui, bahwa perusahaan asuransi memiliki peran penting dalam menghadapi ketidakpastian masa depan bisnis atau kejadian yang tak terduga. Karena itu, perusahaan asuransi ikut mendorong perkembangan bisnis melalui usaha-usaha yang dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya suatu risiko, membatasi kerugian yang terjadi atau menurunkan tingkat kerugian ataupun menyiapkan dana untuk keperluan tak terduga atau keperluan masa depan bagi nasabah individu. Asuransi juga membantu untuk jaminan dana kesehatan, dana pendidikan, kecelakaan kerja, dana hari tua, dana kematian, dan lain-lain.



PT Taspen sebagai BUMN yang bergerak di bidang asuransi, tabungan hari tua, dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara, diharapkan dapat mengelola dana nasabah dengan baik. Dan dengan baik dalam mengembangkan usahanya dengan pertimbangan kehati-hatian dan profesionalitas yang tinggi. Karena selain meningkatkan keuntungan, PT Taspen dan anak perusahaannya memiliki kewajiban untuk memenuhi dana Program Tabungan Hari Tua.

Bapak-Ibu dan Saudara sekalian,

Bahwa beberapa hal yang kita lihat akhir-akhir ini, permasalahan-permasalahan yang kita anggap angkut dari dana pensiun BUMN. Kita melihat bagaimana situasi dari PT Taspen ini yang akhirnya diatasi oleh penggantian direksi yang saat ini masih Plt., *moga-moga* saja cepat untuk dijadikan definitif, Pak. Kita melihat bahwa ada hal yang perlu kita cermati, terutama di dalam pengelolaan investasi. Investasi yang dilakukan, yang saat ini menjadi persoalan adalah dianggap tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dan ada potensi, saya katakan, karena ini sekarang masih masuk wilayah hukum, merugikan dari dana pensiun.

Selain itu, dari informasi yang kita terima atau yang masuk ke Komisi VI, bahwa skemanya sudah tidak relevan di dalam konteks melakukan pengelolaan investasi ya dari dana pensiun, juga ada kekurangan transparan, tidak transparan, tidak akuntabel dalam pengelolaan dana pensiun, hingga hal-hal yang menyangkut kepengurusan yang tidak kompeten, lemahnya pengawasan internal dan eksternal, bahkan ada kecenderungan, ada dugaan praktik korupsi yang melibatkan pengelolaan dana pensiun. Kementerian BUMN mengungkapkan bahwa setidaknya ada 22 dari 48 dana pensiun BUMN Program Pensiun Manfaat Pasti yang memiliki rasio kecukupan dana di bawah 100%.

Secara sederhana, rasio kecukupan dana ini dipakai untuk mengukur kemampuan dana pensiun membayar kewajiban ketika seluruh peserta pensiun bersamaan. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wiroatmodjo, menyatakan kekurangan dana 22 dana pensiun BUMN ini tengah dihitung pihak kementerian bersama Otoritas Jasa Keuangan, perkiraan akhir sekitar 12 sampai 13 triliun. Kekurangan dana tersebut tidak terlepas dari karakteristik dana pensiun BUMN yang mengusung program Manfaat Pasti. Temuan lanjutan mengungkapkan bahwa 16 dana pensiun BUMN hanya mampu mencetak imbal hasil investasi di bawah 6%. Hal ini bahkan, hal ini di bawah rata-rata imbal hasil Surat Berharga Negara. Lebih ironis, ada empat dana pensiun yang cuma bisa *membubukkan*, membukukan imbal hasil investasi di bawah 4%, salah satunya mencatat di level 0,9%.

Di luar keempat entitas itu, di luar keempat entitas itu, dana pensiun Pelindo yang kini tersangkut tindak pidana korupsi bisa mencatat imbal hasil 1,9%. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan audit terhadap tujuh dana pensiun BUMN yang bermasalah. Ketujuhanya yaitu dana pensiun PTPN 1, Angkasa Pura 1, Perum Perhutani,



Rajawali Nusantara Indonesia, Kimia Farma, Krakatau Steel, dan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan. Hasil audit terhadap tujuh dana pensiun itu sudah diserahkan pada Kementerian BUMN. Menyangkut tata kelola dana pensiun PT Taspen, PT Taspen atau Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, sebagaimana lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara, yang akhir-akhir ini kita lihat, ada kasus yang ada, yang cenderung, ya, terkait dugaan investasi fiktif yang merugikan negara, serta penyalahgunaan wewenang oleh petinggi perusahaan yang saat ini sudah dalam wilayah hukum, yang kronologi terungkapnya kita sudah banyak membaca dari berbagai hasil laporan-laporan yang disampaikan oleh lembaga atau aparat-aparat hukum. Yang intinya adalah menemukan indikasi kuat adanya investasi fiktif dalam bentuk pembelian surat utang jangka menengah yang tidak sesuai dengan prosedur dan berpotensi merugikan keuangan negara. Kita berharap bahwa ini akan diusut tuntas, karena sudah masuk wilayah hukum. KPK menemukan dugaan aliran dana dari pihak swasta yang terlibat dalam investasi fiktif tersebut di rekening pribadi mantan Dirut, hal ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang sistematis di tubuh Taspen.

Jadi, Pak Dirut Plt., saya kira ini menjadi satu hal yang membangkitkan, ya, Taspen ke depan. Sebagai modus operan di investasi fiktif ini tidak hanya terjadi di Taspen tapi juga banyak terjadi di beberapa BUMN yang mulai terungkap ya, di mana investasi fiktif dilakukan dengan cara yang sangat rapi dan terselubung, ya. Termasuk yang ada di, kemarin terungkap di PT, apa, *Insight* ya, *Insight Investment Management*, juga terlihat pola-pola seperti di PT Antam dengan *lose* 109 ton emas, ya. Banyak hal-hal yang, pola-pola yang, dokumen-dokumen terkait dengan berbagai hal dalam kaitan ini adalah investasi yang dipalsukan dan disembunyikan dari pengawasan internal maupun eksternal. Hal ini membuat praktik korupsi tersebut sulit terdeteksi selama bertahun-tahun. Tentunya dampak korupsi terhadap peserta Taspen yang harus dipulihkan kepercayaan jajaran direksi saat ini adalah, bahwa skandal korupsi di Taspen tentu saja sangat menimbulkan kerugian bagi para peserta. Kami percaya bahwa jajaran direksi saat ini walaupun masih Plt., bagaimana memulihkan kepercayaan dana pensiun dan jaminan hari tua kepada para, para nasabah atau para peserta Taspen atau kepada lembaga-lembaga yang terkait, perlu dibangun satu komunikasi tentang kondisi saat ini dan ke depannya seperti apa.

Kerugian-kerugian finansial yang dialami Taspen akibat investasi tersebut bisa diyakinkan tidak mengancam keberlangsungan program-program jaminan sosial bagi para peserta. Ini penting terutama kepada tim komunikasi Taspen untuk membangun komunikasi yang intensif, sehingga keraguan-keraguan ketidakpastian itu bisa diberikan penyelesaian-penyelesaian yang memberikan kenyamanan bagi para peserta Taspen, sehingga para peserta Taspen tidak menurun drastis. Dan tentunya peminat-peminat ASN untuk mengikuti program-program tersebut masih dapat dikelola oleh lembaga Taspen.

Saya apresiasi inovasi layanan digital untuk kemudahan peserta, di mana dalam, di tengah isu negatif ini, Taspen juga melakukan berbagai inovasi layanan digital untuk memudahkan peserta dalam mengakses informasi dan layanan. Beberapa inovasi tersebut, antara lain:

- Aplikasi Taspen *Mobile*, aplikasi ini kemungkinan peserta untuk mengakses informasi saldo, simulasi manfaat dan layanan klaim secara *online*.
- Kita juga mengapresiasi digitalisasi pembayaran pensiun, Taspen telah bekerja sama dengan berbagai bank untuk penyediaan layanan pembayaran pensiun secara digital, sehingga peserta tidak perlu *antri* di kantor cabang.
- Konteksifikasi digital, kontekstifikasi digital dengan *face recognition*, Taspen telah menerapkan teknologi *face recognition* untuk *otentifikasi* peserta, sehingga proses verifikasi identitas menjadi lebih cepat dan mudah.

Tantangan dan peluang ini kita harapkan nanti ke depannya akan memberikan suatu optimisme, karena Taspen selain memper, meningkatkan layanan yang lebih, lebih nyaman dengan digitalisasi, tentu efisiensi transparansi itu menjadi sesuatu yang memberikan harapan bagi para peserta tabungan pensiun ke depan.

Demikian pengantar dari kami, untuk itu kami akan mempersilakan kepada Direktur PLT PT Taspen untuk menyampaikan paparannya dari pertanyaan tertulis yang sudah kita kirimkan. Waktu dan tempat kami persilakan.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Salam kebajikan,
Om swastiastu,
Namo Buddhayo,
Rahayu,

Oke, mungkin mohon izin, Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat, yang saya muliakan,

Terima kasih atas kesempatan dalam rapat dengar pendapat tanggal 24 Juni 2024. Jadi, memang di tengah-tengah banyak isu yang ber, beredar di masyarakat terutama di Taspen, *gitu* ya, mungkin saya selaku Plt. Direktur Utama, sangat berterima kasih atas undangan dari Komisi VI DPR RI untuk dapat menyajikan, memaparkan bagaimana *sih* progres mengenai kinerja Taspen, paling *enggak* sampai dengan tahun 2023 akhir, di tengah-tengah berita yang saat ini cukup banyak beredar di masyarakat, *gitu* ya. Mungkin bisa *next slide*.



Agenda utama, agenda hari ini adalah sesuai dengan surat daftar pertanyaan yang kami terima adalah:

1. Evaluasi kinerja korporasi tahun 2023, kemudian
2. Rencana kerja korporasi, dan juga
3. agenda lain-lain, termasuk di dalamnya tanya jawab bila diperlukan.

Next slide. Ya, kita masuk ke *slide* nomor 3, *sorry*, saat ini Taspen melayani 7.611.277 peserta. Data ini adalah data per bulan Mei 2024, di mana peserta aktifnya itu adalah 4.495.847 orang dan ini termasuk juga dalamnya, termasuk di dalamnya ada ada ada ASN, terus ada hakim, pejabat negara, termasuk Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat yang saat ini hadir, juga DPRD dan juga tenaga PPPK. Penerima pensiun sendiri saat ini adalah 3,1 juta orang dan saat ini Taspen mendapatkan hasil audit dengan hasil WTP di tahun 2023 dengan tingkat kesehatan perusahaan adalah *Double A* atau "sehat" yang kita dapatkan di tahun ini untuk Tahun Buku 2023 dari Fitch Rating Indonesia.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

2023 itu berarti kinerja 2022, Pak, ya?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Enggak, 2023, Pak, 2023. Dari Fitch Rating, dari Fitch Rating. Tahun 2022 kita juga di *rating*, Ibu, itu dari PEFINDO, lalu 2023 kita ganti pemeringkat yaitu dari Fitch Rating, sama-sama dua-duanya internasional standar *sih, gitu*. Ya, saya boleh lanjut, Pak Pimpinan? Oke, ya.

Saat ini Taspen memiliki 57 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, lalu 17.084 titik layanan, kemudian juga kita memiliki 44 mitra bayar dan juga saat ini Taspen diperkuat oleh 1.466 orang karyawan. Untuk layanan yang menjadi unggulan kita itu adalah adanya New SIMGAJI, lalu layanan klaim otomatis, Taspen *One Hour Online Service* atau lebih dikenal dengan nama TOOS, kemudian juga ada *enrollment* dan autentikasi *by phone*. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di sesi tanya jawab mengenai detail dari layanan ini semua.

Taspen ini juga memiliki ekosistem grup bisnis. Yang pertama itu adalah Taspen Life, kemudian Taspen Properti dan Bank Mandiri Taspen, di mana Taspen memiliki 48% kepemilikan di Bank Mandiri Taspen dan sisanya itu dipegang oleh Bank Mandiri, dimiliki oleh Bank Mandiri, *sorry*.

Next slide. Untuk dewan komisaris sendiri, saat ini kita diperkuat oleh empat orang dewan komisaris. Komisaris utama adalah Bapak Suhardi Alius, kemudian Ibu Liliek Mayasari, kemudian Profesor Mardiasmo yang dulu sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, dan kemudian Ibu Imas Sukmariah.

Next slide. Nah, ini juga perkenalan *dulu* mungkin, saat ini kami berenam di sini, karena memang Direktur Utama yang saat RDP terakhir hadir di sini yaitu Pak Kosasih, dinonaktifkan pada bulan Maret tahun 2024. Begitu Pak Kosasih dinonaktifkan, maka pemegang saham menunjuk Direktur Investasi atau saya sendiri sebagai Plt., Pelaksana Tugas Direktur Utama, *gitu*, bulan Maret juga. Jadi kalau dihitung sampai sekarang sudah 3 bulan saya ditunjuk sebagai Plt. Direktur Utama. Namun demikian, tetap saya menjalani tugas saya sebagai, yang pokok utama saya sebagai Direktur Investasi.

Kemudian, saya perkenalkan dulu dari sebelah paling kanan, Ibu Diyantini Soesilowati, beliau menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manris. Kemudian berikutnya adalah Ibu Ovita, beliau adalah Direktur SDM dan TI. Kemudian di sebelah kanan saya langsung adalah Bapak Ariyandi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Ibu Rena yang saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan. Kemudian Bapak Feb Sumandar sebagai Direktur Perencanaan dan Aktuaria.

Next slide. Nah, mengenai evaluasi kinerja korporasi tahun 2023, mungkin akan saya sampaikan secara *highlight* posisi keuangan di Taspen. Total aset saat ini adalah berjumlah 376,9 triliun, *liability* adalah 364,4 triliun, total ekuitas 12,6 triliun. Nanti ada *breakdown*-nya di halaman berikutnya. *Next slide*, oke, jadi kalau misalnya kita lihat salah, apa namanya, pendapatan utama dari PT Taspen itu adalah dari iuran dan premi sebesar tahun 2023 adalah 8,4 triliun.

Nah, sementara, saya mohon Bapak-Ibu melihat ke sisi kanan paling bawah, yaitu adalah beban klaim. Beban klaim kita, itu hampir dua kali lipat daripada iuran dan premi, *gitu loh*. Beban klaim kita itu jumlahnya 15,9 triliun, artinya premi yang kita terima itu sangat-sangat jauh di bawah daripada beban klaim yang kita bayarkan. Nah, mungkin pertanyaan yang sering muncul itu adalah bagaimana *sih* cara kita menambalnya, nambalnya itu dari hasil investasi sebenarnya, kalau kita *ngelihat* bagan yang ada tangannya, ada koinnya itu, itu adalah hasil investasi kami. Hasil investasi 8,49 triliun, *gitu loh*, sehingga walaupun iuran premi itu separuh, hampir separuh di bawah beban klaim, tapi paling enggak masih bisa ditambal oleh hasil investasi yang 8,49 triliun. Selanjutnya juga ada PSL Pemberi Kerja, 3,69 triliun. Dan ada beban LMPMD atau cadangan teknis itu jumlahnya adalah 3,57 triliun.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Izin, Pimpinan. Pada bagian ini, iuran dan premi itu dari siapa, Pak?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Oke.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Pemberi kerja itu siapa, begitu, biar jelas.



DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Oke, iuran dan premi yang kita dapatkan itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu ada dari pekerja dan dari pemberi kerja, oke, dari peserta itu adalah 3,25%.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Karena maksud saya, supaya jelas ini iurannya itu terbagi, kan Taspen itu tidak hanya jaminan pensiun, setahu saya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan, itu berapa persen begitu? Berapa persen? Supaya jelas nanti yang diinvestasikan itu apakah jaminan hari tuanya, apakah kecelakaan kerjanya atau kematian.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Mungkin kita bisa masuk ke suplemen saja kali ya, yang ada, ada *breakdown*-nya kan di sini? Nanti kita, iya.

Jadi, begini Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat,

Untuk untuk premi itu, ini terdiri dari untuk yang THT sendiri ini 3,25% dari gaji, ya. Nah, kemudian untuk pensiun sendiri itu adalah 4,75. Mungkin nanti *breakdown*-nya, *breakdown*-nya nanti bisa kita sampaikan setelah paparan ini selesai. Izin, Pimpinan. *Breakdown*-nya seperti apa *gitu* ya, karena kita sudah siapin juga sebenarnya *slide-slide*-nya di belakang, di bagian suplemen. Mungkin izin kita *next slide dulu* Bapak-Ibu, ya.

Nah, jadi ke *slide* berikutnya, kinerja Taspen sendiri dari tahun 2021 sampai 2023, bisa terlihat di, di bagan di atas. Saya ambil dari yang terakhirnya *aja gitu* ya, tahun 2023, hasil, imbal hasil investasi atau YOI (*Yield on Investment*) Taspen itu adalah jumlahnya adalah 7,29%. Saya ulangi, 7,29%. Nah, tadi juga waktu Pimpinan menyampaikan pembukaan, ada separuh dari 40 *something* dana pensiun yang menghasilkan imbal investasi di bawah 6 %, *gitu kan*, beberapa malah 0 koma, beberapa malah 1,2, *gitu* ya. Dan kalau kita melihat, imbal hasil investasi Taspen sendiri itu sebenarnya ada di atas *market*, kalau *market* di kepala 6, di kepala 6,5 sampai 6,9, paling *enggak* di tahun 2023 itu YOI Taspen itu ada di angka 7,29, bahkan di tahun-tahun sebelumnya itu konsisten mendekati 9%, 7,99 dan tahun ini di 729.

Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa aset yang tertera di sisi kanan atas itu adalah aset 148 triliun. Jadi *gini*, aset Taspen yang 300 *something* triliun itu, itu terbagi dari dua buku sebenarnya. Yang pertama adalah buku THT yang jumlahnya itu 148 triliun. Lalu ada buku akumulasi iuran pensiun yang jumlahnya 229 triliun, *gitu* ya. Nah, kalau ditanya laba bersih Taspen itu berapa *sih*, *gitu kan*, laba bersihnya itu jumlahnya 805 miliar tahun lalu, *gitu*. Mungkin ada pertanyaan juga dari masyarakat, asetnya 364 triliun, *kok* labanya cuma 800 miliar. Jadi *gini*, laba 800 miliar itu, itu adalah laba dari aset



yang 148 triliun tadi, yang THT, karena yang dana AIP itu adalah dana titipan dari Kementerian Keuangan, yang kita pupuk, *gitu loh*. *Cuman* tetap dikasih target YOI yang tertentu, *gitu*, dan *Alhamdulillah sih* selama 3 tahun terakhir ini target YOI yang dibebankan kepada Taspen itu bisa kita *achieve*, bahkan lebih-lebih dikit, *gitu*.

Jadi, *tapi gini*, laba bersih itu tergantung, sangat-sangat tergantung daripada kondisi *market*, *gitu ya*, karena memang *core* bisnis Taspen itu yang pertama adalah layanan kepada pesertanya, yang kedua adalah investasi, *gitu*. Jadi, itu sangat-sangat tergantung kepada iklim investasi, kondisi *market* Indonesia, baik *market* obligasi, saham, dan lain sebagainya, juga klaimnya, klaimnya itu berapa *gede gitu* tiap tahunnya, karena berapa pun hasil investasi yang dihasilkan, kalau klaimnya besar atau membeludak, itu bisa mengurangi dari laba bersih kita, ke *bottom line* kita. *Next slide*.

Nah, pertanyaan berikutnya, paparan berikutnya adalah komposisi aset investasi di Program THT maupun AIP. Sebagaimana tertera di bagan, mayoritas investasi di PT Taspen itu adalah di Surat Berharga Negara atau *government bonds*, *gitu ya*, kenapa *government bonds*? Karena yang pertama memang relatif lebih aman dibandingkan instrumen yang lain dan, apa namanya, untuk volatilitas harganya itu tidak terlalu berfluktuasi seperti instrumen lain seperti saham, *gitu*, jadi memang dalam 10 tahun terakhir memang kami lebih memilih untuk berinvestasi di instrumen-instrumen yang sifatnya *fix income*. Jadi, *breakdown*-nya seperti ini, untuk THT, jumlah dari SBN-nya itu adalah hampir 50%, sementara untuk buku AIP atau Akumulasi Iuran Pensiun itu mencapai 68%, *gitu loh, next slide*.

Nah, untuk inovasi dan layanan teknologi teknologi digital, tadi sempat juga disinggung oleh Bapak Pimpinan, jadi yang menjadi andalan kita itu saat ini adalah Taspen *One Hour Service*, nanti penjabarannya akan kita sampaikan. Nah, nanti mungkin disampaikan oleh Bapak Ariyandi (Direktur Operasional), tekniknya seperti apa. Kemudian juga ada *autentifikasi*, aplikasi ini digunakan untuk membuktikan bahwa peserta pensiun itu masih hidup dan berhak untuk dana pensiun, jadi melalui HP. Lalu juga elektronik SPTB. Kemudian juga ada teknologi SIMGAJI web atau aplikasi *host to host* dengan pemda-pemda, yang dapat mendukung proses pengolahan gaji PNS. Kemudian, kita juga memiliki 103 titik *mall* pelayanan publik. Kemudian mitra *channeling* yang terdiri dari 17.084 *point of service*.

Next slide. Nah, jadi inovasi layanan klaim Taspen, ini kita bacanya kayak searah jarum jam. Jadi awalnya itu memang klaim kita itu tadinya 7 hari, lalu menjadi 3 hari dan 1 hari, kemudian layanan klaim 1 jam, layanan proaktif, Taspen Oten, layanan klaim otomatis, layanan antar bayar pensiun, dan saat ini sudah menjadi Taspen *one hour online service*, *gitu*.

Nah, *next slide*, untuk rencana kerja korporasi tahun 2025, 2025 ini adalah fokus kami di Taspen itu adalah kita akan fokus kepada pelayanan, *gitu*. Tentunya tidak mengesampingkan aspek-aspek lain seperti GCG, investasi, tata kelola dan sebagainya, karena itu sangat penting, *gitu ya*,



karena memang itu DNA Taspen, investasi dan layanan, *cuman* di tahun 2025 kami bertujuan untuk meningkatkan layanan lebih yang lebih baik lagi kepada peserta kami, di antaranya itu adalah ada berbagai macam program, yaitu Andal *by* Taspen atau Taspen *customer digital service*, lalu sentralisasi proses klaim, lalu juga klaim tanpa dokumen, di mana kami berusaha untuk memastikan bahwa administrasinya tepat, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Itu yang akan menjadi andalan kami di tahun 2025, dengan tetap memperhatikan kesesuaian investasi dan optimalisasi hasil investasi yang menunjang layanan Taspen. *Next slide. Oh, oke.*

Terima kasih atas waktunya, Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Selanjutnya, kami serahkan kepada Pimpinan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat pada hari ini.

Selanjutnya, kami akan memberi kesempatan kepada kawan-kawan Anggota untuk melakukan atau menyampaikan pendalaman terkait dengan paparan dari Pak Plt. Dirut. Yang sudah terdaftar di sini, ada Pak Rudi Hartono Bangun, Bu Rieke Diah Pitaloka, Ibu Nevi, Pak Hendrik dan Pak Muslim. Kami beri kesempatan yang pertama pada Pak Rudi Hartono Bangun.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Terima kasih, Pimpinan, Ketua yang saya hormati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan, Ketua, dan seluruh rekan Anggota,
Yang saya hormati Pak Dirut, dan Direktur, dan
Seluruh jajaran,
Pak Dirut yang baru, yang Plt., dan semua jajaran yang Direksi Taspen,**

Ini saya disampaikan laporan posisi keuangan konsolidasi Taspen. Jadi, bersamaan ini saya selaku Anggota, ingin mempertanyakan juga terkait yang banyak dipertanyakan yang terjadi di Taspen sekarang. Pak Dirut, Ibu, kalau ada Dirut keuangan, ini *kan* konsolidasi keuangan per 31 Desember 2023, di sini, Pak, disampaikan ada asetnya Taspen sejumlah 376,9 triliun, Pak. Juga disampaikan liabilitasnya, Pak, ada 364, juga ekuitasnya Pak, 12,6 triliun, *gitu*, jadi bukan dikit-dikit ini, Pak. Di sini Bapak sampaikan juga ada laba rugi, Pak, laba rugi penghasilannya Taspen. Jadi saya lihat, saya *analisa*, ini laba rugi ini *kan* bersumber dari dari pengelolaan, Pak, dari pengelolaan keuangan *kan*, dari iuran, dari premi, *gitu*, dan hasil investasi, inilah laba dan rugi, ya Pak, ya.



Nah, yang saya ingin minta, Pak, detailnya ini, penjelasan, mungkin tertulis atau lisan *tapi* saya minta tertulis yang lebih detail, Pak. Kepada Pak Dirut yang baru, Bapak belum mengenalkan tadi namanya, jadi saya bilang Dirut baru saja, oh Plt., dan Dirut yang lama, Pak. Nah, ini sebenarnya pengen penjelasan. Di sini *kan* ada 8,49 triliun, Pak, hasil investasi Taspen. Ini yang saya ingin tanya ini, dari tadi saya nanya sendiri. Ini investasinya apa saja, Pak? Yang dibuat Taspen, *gitu*. Jenis model bisnisnya *gitu*, yang 8,49 T ini apa saja? Tadi saya sekilas Bapak bilang hasilnya 2,9 *cuman*, 2,9 triliun tadi, saya butuh detail makanya.

Kemudian *kan gini*, Pak, ini *kan* ada iuran dan premi di tahun 2023, 8,4 ini. Ini iuran, bentuknya apa, Pak? Apa saja ini, Pak? Dari mana saja ini, Pak, yang bayar iuran dan premi ini, *gitu*. Lalu yang juga ingin saya jelaskan, iuran dan premi ini, Pak, ini disimpan di akun di rekening siapa, *gitu*? Apakah rekeningnya si dirut bisa langsung masuk? Atau ke rekening perusahaan Taspen, *gitu*? Ini yang saya ingin penjelasan. Atau bisa langsung main investasi ke manajer investasi uang iuran tadi, uang iuran dari DPR, dari PNS, dari semua, Pak. Bagaimana skemanya, Pak, itu yang dikelola ini, *gitu*, iuran dan premi ini?

Lalu yang ketiga, Pak, ada juga yang saya bingung ini, makanya saya belum paham tadi, jelasan Bapak juga saya *enggak* kedengaran. Beban LMPMD, cadangan teknis Bapak buat, taktis teknis, sebesar 3,57 triliun. Nah, ini cadangan apa, Pak, ini, maksudnya dana cadangan, kalau ada Direktur Keuangan atau Direktur Utama ini, Pak, ini, ini cadangan untuk apa *gitu*? Dan apa kepanjangan ini LMPMD, *gitu*? Siapa yang *ngambil* ini, Pak? Yang nerima itu L, LM, LMPMD ini siapa, untuk dana taktis 3,5T ini *nih*? Nah, itu mohon ini nanti juga harus detail, *gitu*. Dan dari hasil semua ini *kan*, Pak, yang Bapak paparkan ini dari semua pengelolaan uang tadi *kan*, Taspen ini *kan* hanya, hanya didapat laba di Taspen ini, Pak, ini Bapak buat, 800 miliar, iya? Betul *kan*, Pak? Per tahun? Ah, hanya labanya sekarang *dikurangin* EBITDA, segala macam, pendapatan kotor, tinggal 800 miliar. Nah, ini yang saya pengen tanyakan, bagaimana skema pengelolaannya, *gitu*?

Dan yang kelima, Pak. Dari total dana yang triliunan tadi, ratusan triliun tadi yang dikelola Taspen ini, Pak, saya ingin mendapat juga skema detail, Pak, nantinya, tertulis, Pak. Bagaimana skema kerjanya *gitu*, berapa yang dihasilkan dari Bapak bilang investasi, dari lembaga perusahaan mana atau dari *invest* emas atau dari bursa. Nah, ini *kan* enggak ada Bapak jelaskan. Saya mohon tertulis nanti, biar kami bisa baca.

Dan yang terakhir, Pak, sebenarnya pertanyaan ini saya sudah pernah sampaikan ke Dirut yang lama, Pak Kosasih itu. Saya *nyampaikan* "Bagaimana selama ini Anda mengelola uang ini?", agak mirip-mirip pertanyaan saya, Pak. Tapi dia menyampaikan, katanya dalam kondisi aman terkendali, *gitu*. Tapi nyatanya, nyatanya *kan*, Pak, bukan saya yang bicara tapi ada pihak-pihak terkait lembaga hukum yang membuktikan bahwasanya dana ini ada yang dikorupsi, *kan gitu*, Pak.



Nah jadi artinya tidak, tidak benar yang disampaikan kemarin, rapat-rapat kita beberapa kali sama kawan-kawan dan Pimpinan. Dan saya usul, Pak, nanti di, apa, kesimpulan Pak Pimpinan dan untuk minta Menteri BUMN dan Komisi VI harus memberikan, memberhentikan Dirut secara riil dan juga Dirut Keuangannya, karena apa? Karena Dirut dan Dirut Keuangan *kan* terkait, Pak, Direktur Keuangan terkait. Coba bayangkan, Pak, ya, apa fungsi Direktur Keuangan jika selama ini uang Taspen bisa dipindahkan ke rekening tadi dibidang Dirut. Apa fungsinya, Pak? Memang perusahaan swasta, perusahaan saya pribadi atau perusahaan Bapak pribadi? *Kan* ada mekanisme, Pak. Kalau itu lewat mekanisme, artinya Direktur Keuangan ACC, Pak. Pindahkan ke tempat saya, saya Dirut, lewat itu, Pak.

Jadi artinya, di sini, Direktur Keuangan dan Kepatuhan, apa pun namanya, pasti dugaannya terlibat. Jadi, jangan Dirut saja yang ditahan atau yang ditarik sama penegak hukum. Nah, jadi saya ingin mengingatkan, Pimpinan.

Dan yang terakhir, hasil *invest* tadi yang 2,9, ini dari total uang 360, pantas *enggak*, Pak? 364 miliar, berarti 1% pun *enggak* sampai, ya *kan*, Pak? 2,9 T, asetnya ini 340 T. Jadi, ini yang selisih lagi *nih*, Pak, banyak ini, ratusan miliar *gitu*. Nah itu Pak Pimpinan dan kawan-kawan Anggota, saya mohon bisa di, apa, kesimpulan disampaikan usulan saya.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Ibu Nevi Zuairina.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya lama *enggak* lihat Bu Nevi ya.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Ya, terima kasih, Pak.

Dan dari Taspen bersama jajaran,



Bapak-Ibu semua, baru-baru ini kita sudah mendengarkan berita bahwa KPK menyebut korupsi di Taspen itu ada investasi fiktif yang dilakukan perusahaan pada tahun 2019 dengan nilai investasi yang mencapai 1 triliun. Bagaimana dampak kasus ini terhadap pelayanan Taspen kepada nasabah-nasabahnya dan perbaikan sistem evaluasi internal seperti apa yang harus kita miliki, mungkin semacam *early warning*, peringatan awal untuk supaya tidak terjadi kasus di masa ke depan, ya, untuk Taspen ini, karena ya tentu ini adalah dana yang diberikan amanah oleh para pegawai-pegawai negara yang harus kita jalankan sebaik-baiknya.

Lalu yang kedua, sebetulnya *sih* saya ingin menanyakan saja, *kok* bisa ya Taspen ini mendapatkan opini WTP, ya, dengan tingkat kesehatannya AA. Bagaimana objektivitas proses penilaian tersebut, ya, bagaimana? Artinya dengan ada kejadian ini, kita dapat opini WTP, nah, ini kenapa bisa terjadi.

Lalu yang ketiga, bagaimana manajemen PT Taspen bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia secara umum dan nasabah secara khusus pasca penetapan tersangka, ya, oleh KPK awal Mei. Dan kami ingin agar *marwah* BUMN dapat kembali baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat secara penuh, agar kinerja BUMN dapat dicapai secara maksimal. Tanpa kepercayaan masyarakat, saya yakin dan percaya BUMN kita ini tidak akan berlanjut.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Selanjutnya, kami persilakan Bu Rieke Diah Pitaloka. Yang lain *dulu*, Pak Hendrik.

F-P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

**Ibu-Bapak Anggota Komisi VI yang saya hormati, dan
Plt. Dirut Taspen beserta jajaran direksi yang saya hormati,**

Selamat sore,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,

Yang pertama, saya mau menyampaikan kepada Plt. Dirut dan jajaran direksi yang hadir dalam forum rapat ini, bahwa rapat dengan Komisi VI yang kita laksanakan sekarang, saya berharap Bapak dan Ibu tidak memaknai dia sebagai suatu kegiatan yang biasa saja dengan DPR, ya. Saya menangkap



kesan, beberapa kali rapat dengan mitra Komisi VI, sepertinya kami ini sedang melaksanakan suatu rutinitas perkantoran DPR yang sementara kita jalani. Tidak, kita sedang melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dan saya minta oleh karena itu, presentasi-presentasi atau materi-materi disampaikan dalam rapat dengan Komisi VI haruslah materi yang *men-disclose material fact* yang terjadi di perusahaan yang Bapak pimpin, ya.

Ringkas itu bagus tapi jangan terlalu ringkas, sehingga menyembunyikan data dan fakta yang sebenarnya kita ingin tahu. Kami sebagai Anggota Komisi VI menjalankan fungsi pengawasan, punya kewajiban untuk mengetahui, punya hak untuk mengetahui. Kami minta supaya ada *disclose* materi yang lebih komprehensif, meskipun kemasannya agak ringkas, itu yang pertama.

Berikutnya adalah perusahaan yang Bapak dan Ibu pimpin, ya, adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang asuransi, tabungan hari tua, dana pensiun, dan kita semua tahu, asuransi itu industri yang sangat *highly regulated banget*, semuanya sudah ada di situ aturannya *tuh*.

Kalau *incompliance with the regulation* saja, mestinya tidak ada kabar-kabar buruk yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan negara yang bergerak di bidang industri perasuransian. Memang Taspen tidak seperti asuransi yang lain, tapi *kan* ada *core* bisnisnya juga asuransi salah satunya, selain tabungan hari tua dan dana pensiun. Nah, ini *kan* paradoks sekali ya, mengelola satu perusahaan yang bergerak di industri yang sangat *highly regulated* tapi ternyata kebocoran-kebocoran itu terjadi juga. Bapak dan Ibu sebenarnya tidak seperti asuransi swasta yang harus *fight* di *free market*, ya. Pasar Bapak dan Ibu itu pasar yang *captive*, yang sudah ada, kecuali TNI dan ASN di lingkungan TNI yang memang harus dikelola di Asabri, kalau saya tidak salah, ya. Tapi selain itu adalah Taspen. Bayangkan, mengelola begitu banyak dana milik para nasabah, milik para, yang kalau dikelola secara tidak secara *prudent*, maka pasti terjadi seperti yang kita konsumsi beberapa waktu belakangan ini terkait dengan apa yang terjadi di Taspen.

Memang yang paling penting bagi kami sebenarnya soal *moral hazard* Bapak dan Ibu sebagai pengelola. Saya melihat dalam lampiran presentasi ini ada inovasi, ada penerapan, apa, adopsi terhadap aplikasi yang yang, yang,, yang sesuai dengan perkembangan era teknologi digital saat ini. Itu sesuatu yang baik, tapi jauh di atas itu sebenarnya soal *moral hazard* Bapak dan Ibu sebagai pengurus dan pengelola industri ini, perusahaan ini. Jadi, saya minta di bawah manajemen baru nanti barangkali, kita mau mendengar *success story* dari Taspen. Kita tidak mau mendengar kisah-kisah yang kurang baik dari Taspen, karena ini sangat, perusahaan yang sangat nyaman sekali kalau dikelola, orang *captive market kok*. *Eenggak* perlu berlelah-lelah harus bersaing di pasar, ya.

Nah, saya mau masuk ke pertanyaan yang sifatnya agak teknis sedikit, Pak. Hasil investasi yang 8,49 T itu memang terpapar di sini juga, Bapak



menempatkan investasi itu di berbagai bidang. Yang terbesar adalah di Surat Berharga Negara. Apakah Surat Berharga Negara ini surat utang negara yang paling besar persentasenya ataukah surat berharga *syariah* negara, itu? Berapa persentasenya? Bisa di, bisa dikasih angka-angka ke kita *enggak*? Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kecil jumlahnya, ada juga Bapak bermain di saham, ya, 6,99%. Nah, di sini yang saya mau bilang, ini kontradiksi dan paradoksnya ada di sini. Asuransi *kan* sesuatu yang, yang terkait dengan mekanisme pengalihan risiko dan itu sesuatu yang *certain*, yang pasti. Yang *risk*-nya itu *tuh* bisa sudah sudah diketahui sebelumnya.

Kalau saham, bukankah saham itu adalah sesuatu usaha yang sangat spekulatif risikonya? Bisa Bapak untung, bisa Bapak buntung juga *kan*. Mengapa harus bermain di saham? Mengapa tidak porsi besarnya itu ditarik saja kepada Surat Berharga Negara yang lebih pasti dibandingkan dengan saham yang fluktuatif misalnya? Apa justifikasi bisnisnya? Apakah bisnis *adjustment* Bapak itu, apa yang, apa yang menjadi bisnis *adjustment* Bapak sehingga harus bermain di saham ini? Dengan kondisi pasar global-regional-nasional yang tidak menentu seperti sekarang. Menurut saya sangat berisiko kalau itu diinvestasikan dibidang saham, *capital market* maksud saya. Kecuali kalau itu SBN, saya percaya itu lebih, lebih, lebih *oke*lah lebih, lebih aman, lebih baik dibandingkan dengan saham yang sangat fluktuatif itu.

Saya kira, berikutnya lagi soal, saya ini *kan* mewakili daerah, daerah dapil saya itu di Maluku, Pak. Saya sempat berkunjung juga kantor Taspen di sana, Maluku. Saya harus memberi apresiasi bahwa memang dari sisi pelayanan itu sudah banyak yang merasakan ada kemajuan, terutama dari, apa namanya, jangka waktu untuk memproses klaim dan sebagainya, dibandingkan dengan kurun-kurun waktu sebelumnya. Tetapi yang saya mau tanya kepada Bapak adalah soal kebijakan sentralisasi pembayaran klaim. Sentralisasi pembayaran klaim itu *tuh* memang sudah dievaluasi itu, baik atau bagaimana? Karena, bayangkan, kalau itu sentralisasi maksudnya itu *kan* dibayar di pusat, Pak ya, maksudnya, Pak? Bukan dibayar di Taspen-taspen daerah, bukan? Bukan diproses di Taspen di cabang atau di, tapi di semuanya di pusat? Maksud sentralisasi di sini apa *nih*? Prosesnya? Kenapa tidak desentralisasikan prosesnya? *Kan* digitalisasi hari ini. Kenapa semua harus ditarik ke pusat? Apa pertimbangan teknisnya sehingga harus dibuat sentralisasi. Kenapa tidak dibikin desentralisasi? Saya butuh penjelasan terkait itu. Saya kira itu beberapa pertanyaan yang saya sampaikan.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaiikumsalam,

Ke Ibu Rieke Diah Pitaloka.



F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu,

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang kami hormati PLT Direktur Utama PT Taspen (Persero) beserta
jajarannya,
Hadirin yang hadir di dalam rapat Komisi VI DPR RI,**

Menyambung dari beberapa teman terdahulu, tapi sebelumnya izin Pimpinan, saya minta dipaparkan skema tadi terkait beberapa jaminan. Jaminan kecelakaan kerja, program tabungan hari tua, program pensiun, program jaminan kematian, *cost sharing* antara pekerja dan pemberi kerja, itu persentasenya seberapa, Pak. Izin, boleh Pimpinan?

Pak Dirut, bisa dijawab? Boleh, Pak, supaya jelas ini, karena ini bergerak di asuransi *tapi* sebetulnya bukan mencari nasabah, seperti Pak Hendrik katakan tadi, pesertanya *udah* ada, *gitu*, jadi seperti kantong semarlah, ya *kan*, orang mau *enggak* mau, semua PNS itu harus dipotong gajinya langsung dari rekeningnya.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Untuk, untuk detailnya, Bu Rieke, mohon izin, nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Direktur Operasional.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Izin Pimpinan, jangan, jangan nanti, Pak.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Saya juga boleh, *enggak* apa-apa sih.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Karena karena uang yang diakumulasi ini kan yang diinvestasikan?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Oke. *Slide*-nya ada *enggak*? Oke, *sebutin* ya. Jadi, untuk THT itu *rincian*-nya adalah 3,25% dari gaji pokok plus tunjangan istri, suami, dan anak, ya. Kemudian untuk JKK, itu dari pekerja, JKK 0,24%



F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

0,24% dari?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Dari gaji pokok.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Tunjangan dan anak?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

No, no, gaji pokok.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Gaji pokok dari pekerja atau ada *cost sharing*?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Dari pekerja. Eh, *sorry*, dari pemberi kerja. *Sorry, sorry*.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Jadi pemerintah berarti, ya?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Iya. Terus, JKM 0,72.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

JKM?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

0,72 dari gaji pokok, ini juga dari pemberi kerja. *Oke*, terus ada lagi?

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

JHT 3,25% dari pekerja. Jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan tabungan hari tua, pensiun, pensiun.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Nah, pensiunnya, 4,75%.



F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Dari?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Dari gaji pokok plus tunjangan.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Dari pekerja, berarti. *Enggak* ada dari pemberi kerja?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Enggak.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Oke, terima kasih, Pimpinan. Saya lanjutkan.

Jadi, ini perlu *clear* juga ke publik bahwa yang dikelola oleh dana Taspen sebetulnya bukan, bukan seperti bisnis asuransi pada umumnya begitu, ya. *Tapi* ini adalah uang dana amanah kalau kita sebut di dalam skema jaminan sosial. Dan amanah *cost sharing* antara pekerja dan pemberi kerja, begitu. Dan yang ditanggung oleh pemberi kerjanya yaitu pemerintah, tadi 0,24% untuk JKK dan 0,72% untuk jaminan kematian. 4 + 2, 6, 2 + 7, 9, berarti 0,96% saja yang dari pemberi kerja. Betulkan, Pak? Sisanya 3,25% plus 4,75%. 25, 10, 10. 8%, 8% itu adalah dari gaji pekerja, baik itu PNS, begitu? Lalu apalagi, Bapak? Pejabat negara, Anggota DPR dan DPRD, ya.

Jadi, ini adalah uang potongan gaji mereka yang bekerja pada negara. Uang ini lalu diinvestasikan. Nah, koreksi kalau saya salah. Saya ingin menanyakan visi dan misi dari Taspen ini, apakah masih sama atau sudah berubah. Visi "Menjadi perusahaan asuransi sosial dan dana pensiun yang unggul, terpercaya, dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia", masih? *Alhamdulillah*, masih. Kemudian misinya "Memastikan terwujudnya layanan terbaik dan investasi yang andal serta kepemimpinan inovasi bisnis dan transformasi digital dengan SDM yang amanah, kompeten," saya ulangi, "amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif."

Kita kembali ke visi.

Pimpinan dan Anggota, izin,

Ini adalah perusahaan asuransi sosial, bukan asuransi komersial. Betul, ya, Bapak, ya? Asuransi sosial artinya sistemnya saja yang untuk seperti komersial tetapi prinsip di dalamnya adalah asuransi sosial. Kenapa demikian? Karena dana yang dikelola adalah dana amanah. Dana dari para pekerja, bukan seperti asuransi komersial asuransi swasta yang dia memang



orang yang ingin mengasuransikan di luar potongan upahnya, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, kebetulan, kebetulan Plt. Dirut Taspen ini adalah sebelumnya pernah menjabat Dirut PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero), Dirut PT BRI Danareksa Investment Management, bukan? Tapi yang jelas Direktur Investasi PT Taspen. Maaf ya, yang dua berarti bukan? Jadi Direktur Investasi PT Taspen. *Kebeneran*, Pak.

Nah, dana-dana yang diakumulasikan tadi, Bapak, saya kira di sini berarti ada 108,69 triliun yang untuk THT, Tabungan Hari Tua, yang potongan 3,25% ya? Betul ya? Kemudian yang iuran pensiun juga itu dana dari potongan pekerja 4,75%. Saya langsung saja ingin menyampaikan, sama sebetulnya seperti rekan-rekan yang lain. Ada indikasi kuat terjadinya investasi fiktif yang sudah ramai di pemberitaan, begitu. Betul ya, Pak, ya? Investasi fiktif 1 triliun, berarti kalau saya boleh katakan, dengan tadi kenapa saya minta dijelaskan ini uang siapa, pekerja kah atau mereka yang seperti di asuransi komersial. Ternyata uang ini adalah uangnya para pekerja yang bekerja pada negara. Dari atas sampai bawah, Pak, ya?

Jadi, jangan dibayangkan hanya pejabat negara di level atas. Totalnya berapa sekarang, 3 koma berapa juta, Pak? Total 7,611,277, dari atas sampai bawah, potongan gaji orang yang bekerja. Saya ulangi lagi, Pak, ya. Potongan gaji orang yang bekerja sampai level bawah. Jangan *ngebayangin* yang jabatan-jabatannya menengah ke atas, yang gajinya *gede*. Bayangkan, Bapak, supaya punya imajinasi yang sama *nih*, karena saya yang *ngotot* minta penjadwalan Taspen. Bayangkan, uang ini adalah uang yang mereka, mereka yang bekerja *tuh* yang pelayan kesehatan, ya, ada yang penyuluh, ada yang guru, Bapak, di kampung-kampung di seluruh Indonesia.

Coba Anda bayangkan, ini bukan uang dari APBN sebetulnya. Tapi potongan gaji. Karena dia bekerja pada negara, gajinya dari negara, benar dari APBN, tapi itu adalah haknya sebagai pekerja. Yang ingin saya tanyakan dan kebetulan Anda sebelumnya adalah Direktur Investasi PT Taspen. Jelaskan kepada kami, bagaimana skema dan proses persetujuan investasi di PT Taspen? Bapak ini jangan *kayak enggak ngerti, enggak ngerti*, ya, soal tadi pembagian persentase, atau memang tidak mengerti? Bukan, yang tadi, misalnya ini dari potongan upas. Memang tidak tahu? Harusnya tahu, supaya kita *feel*-nya *tuh* sama. Oh, ini duit orang yang kerja di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia, total 7,6 juta tadi. Bagaimana fungsi manajemen risikonya?

Jadi yang pertama, bagaimana proses persetujuan investasi di Taspen. Di mana posisi Komite Investasi Taspen, bagaimana prosedur pengangkatan pimpinan dan anggota. Apa ada Komite Investasi Taspen? Ada *kan*? Bagaimana mekanisme seseorang bisa ditetapkan sebagai Komite Investasi Taspen? Lalu bagaimana skemanya dan Anda juga sekarang masih merangkap sebagai Direktur Investasi Taspen. Keputusan itu *kan* pasti tahu *dong*, kalau *enggak* tahu berarti saya jadi bertanya, kenapa bisa ada di sini. Tahu *kan*? Bagaimana prosedur mekanisme SOP investasi itu? Lalu karena ini sudah jadi pemberitaan. Saudara-saudara, jadi uang potongan gaji tadi terindikasi kuat ada investasi fiktif sekitar kurang lebih 1 triliun, betul ya?



Meskipun sekretaris perusahaan pada 3 September 2023, *Corporate Secretary*, Mardiyani Pasaribu, masih? Sudah *enggak*? Sudah pensiun? Dia mengatakan, "Tidak ada apa-apa", tapi kemudian ada indikasi investasi fiktif 1 triliun. Nah, *kan* orang investasi *nih*, direktornya, apa *sih* yang dimaksud investasi fiktif? Tolong *dong jelasin*, Pak? Paling tidak kepada kami di sini, begitu. Nah, dari penelusuran berita yang sudah dilansir oleh media-media yang kredibel, saya kira. Rekanan Taspen dalam investasi fiktif ini adalah PT Insight Investment Management. Bagaimana prosedur Anda bisa memutuskan menyetujui sebagai Direktur Investasi? Apakah tidak melalui persetujuan Direktur Investasi atau tanpa sepengetahuan Direktur Investasi ke PT Insight Investment Management? Dan PT Insight Investment Management ini ke mana investasinya?

Tadi *kan* Pak Hendrik sudah menyinggung *tuh*, ada investasinya, ini juga nanti mohon tertulis Bapak ya, mohon tertulis. Investasinya ini, SBN, reksa dana obligasi, korporasinya ini apa? Apa, apa obligasi korporasi, ya Pak Hendrik, ya? Pak Hendrik. Jangan seperti makro begini *dong*. Kita juga harus tahu, depositonya di mana, sahamnya, dan seterusnya, dan sebagainya. Nah, apakah PT Insight Investment Management termasuk di dalam struktur investasi yang Bapak jelaskan tadi? Tapi ke mana jelasnya, begitu. Nah, bagaimana, yang terakhir adalah, bagaimana dengan mitigasi Taspen, agar tidak terjadi hal serupa ke depan? Kebetulan Anda merangkap jabatan, Plt. Dirut dan masih menjabat sebagai Direktur Investasi. Persoalan asuransi sosial, investasinya juga, sesuai dengan, tadi misinya "Kepemimpinan yang amanah" itu yang paling penting menurut saya.

Kita memperjuangkan agar, ini dana amanah, Pak, kalau kami dalam jaminan sosial, karena ini dalam asuransi sosial, bukan komersial, sebenarnya ini dana amanah. Bagaimana mekanisme keputusan investasi itu. Yang terakhir, hasil pemupukan atau investasi itu diberikan kepada siapa? Apakah diberikan nanti dalam perhitungan THT masuk, termasuk pensiun? Apakah kami semua termasuk yang ada di ruangan ini, termasuk teman-teman sekretariat yang PNS, yang dipotong tadi total 8% itu, yang Saudara putuskan investasi? Apakah ada akumulasi nanti ketika kami pensiun? Atau kami hanya mendapatkan seperti akumulasi dari nilai, dari angka uang yang sekarang?

Tapi nilai pemupukannya itu diserahkan atau tidak, kepada peserta yang notabene adalah dari potongan gaji ini? Saya tidak tahu apakah, kalau di Taspen mungkin sudah bukan PNS, ya? Tetapi kalau asuransi itu *kan*, kalau kita asuransi komersial, *kan* sistemnya *nih* asuransi komersial, hasil pemupukan itu nasabah dapat *dong*, Pak. Benar *enggak*? Nah, kalau di Taspen, nasabah dapat *enggak*? Jangan sampai nanti mereka terutama yang di garda terdepan pelayanan publik, kerja dipotong total 8%, ternyata nilainya itu tidak mengikuti hasil investasi dan tidak, tidak ada maknanya untuk *invest*, untuk pensiun dia 20 tahun ke depan, misalnya. Nah, ini juga perlu kami tanyakan, mohon dijawab.



Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Selanjutnya, Pak Darmadi.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Selamat datang Direksi PT Taspen dan jajarannya,

Kalau saya lihat *nih*, ini *kan* ada beban klaim 15,93 T. Kemudian iuran dan premi 8,41 T. Berarti *kan* ada defisit, untuk itulah dilakukan kegiatan investasi, menghasilkan 8,49 T. Nah, dalam melakukan investasi, di sinilah muncul korupsi, dugaan korupsi fiktif, ya *kan*. Dugaan korupsi fiktif yang dipakai dananya 1 triliun, begitu *kan* kira-kira. Nah, nanti tolong dijelaskan kepada kami, kira-kira modus utamanya *gimana*, ini yang kami *enggak* tahu *nih*. Dapat uangnya bagaimana Dirut ini. Saya yakin *nih* rata-rata tahu permainannya tapi *kan* kami *enggak* tahu, coba dijelaskan sampai bisa, kalau saya lihat video-video itu, ada yang satu hari 200 juta bisa dikasih. Berarti *kan* ada kolaborasi dugaan dengan PT Insightful ini, betul, ya? Pak Dirut. Insight Investment, Pak Ekiawan Heri. Nah, dijelaskan juga kronologis dari mulai pertemuan, sejak kapan ini kenal ini PT Insight Investment ini, ya, sudah lama atau belum *nih*, Pak Dirut *nih* kenalinya? Berhubungan dengan Taspen, iya, iya, yang sudah lama.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Jadi, sekalian klarifikasi tadi, Ibu. Jadi kasusnya itu, kejadiannya *kan* bulan Mei 2019, ya *kan*. Saat itu memang Pak Kosasih itu jabatannya sebagai Direktur Investasi. Saya baru masuk 2020. Jadi itu sudah sudah, sudah berjalan, Pak. *Cuman* kalau tadi pertanyaan Pak Darmadi bertanya, sudah lama atau belum Pak Kosasih kenal sama Pak Ekiawan, saya *enggak* tahu jawabannya *gitu*, Pak.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Bapak kenal sama Eki?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Kenal, ya karena saya di *market* pasti kenal.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Kenal, ya.



DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Sama-sama dari MI juga, *gitu*, dari Bahana, *gitu kan*. Jadi, *kan* orang di *market kan* itu-itu *aja* Pak, mutar-mutar saja. *Cuman* saya *enggak* tahu hubungannya antara Pak Kosasih sama Pak Eki. Nah, kalau kronologi seperti apa, usul, kami susun kronologisnya, ya. Tapi *kan gini*, sekarang itu masih dalam ranah hukum, Pak. Masih terus ada penyidikan oleh KPK, *gitu ya*, sudah berlangsung 3 bulanlah, semenjak beliau dinonaktifkan. Kalau boleh *sih* kami jawabnya secara tertulis dan tertutup, *gitu loh*.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Tahun berapa Pak Kosasih diangkat jadi Dirut?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

2020, Januari.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

2020. Jadi Dirut?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Iya, sebelumnya *kan*, sebelumnya itu Direktur Investasi di Taspen, tahun 2000, 19 ya? Iya, ya?

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

2000 kapan?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

2018, iya.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

2018 jadi Dirut?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Dirut Investasi.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Ya, Dirut, Dirut?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Kalau Dirutnya, 2020.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

2020, *oke*, saat itu Bapak-bapak belum tahu ini? Belum mencuat permainan ini?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Kan belum masuk situ, Pak.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

2019 *kan* sudah terjadi.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Kami, kami belum masuk situ, Pak.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Eggak, oh, semua *nih* baru? Diganti, ya, betul. Ini yang saya bingung *nih*. Nah ini, itu perlu penjelasan. RUPS 2022 itu *kan* menetapkan Antonius Kosasih sebagai Dirut lagi, betul *kan*?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

2023.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

2022 apa 2003 RUPS?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Eh, belum.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

2022 *kan*? Ya, artinya ditetapkan jadi Dirut *kan*? Dipilih kembali jadi Dirut, *gitu* *kan*?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

2024, periode kedua.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):



Periode kedua, iya. Nah, ini nanti tolong disusun saja, biar kita *ngerti* kronologisnya seperti apa. Dan modusnya seperti apa. Ini *kan investment*, ya, nah, berarti *kan* kalau dia fiktif, *kan* berarti dia menggunakan dana dari investasi itu untuk kebutuhan pribadi *kan*, kira-kira begitulah *kan*? Jadi, mohon nanti dijelaskan secara tertulis, ya, kalau nanti bisa sekilas bisa kasih, ajarin kami, kami ini *enggak ngerti* semua, begitu, ya.

Yang kedua adalah saya lihat bahwa apa langkah selanjutnya, Bapak? Karena saya kalau saya lihat ini, DER-nya ini parah ini *kan*. *Debt Equity Ratio*-nya *kan* parah *kan*?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Iya.

F-PDIP (Prof. Assc. Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Ini kalau saya catat di sini, DER-nya ini 300-an triliun, ekuitasnya cuma 12, betul? Betul *kan*? Utang ini banyak terutama utang ke masyarakat *kan*, utang ke pekerja dan sebagainya, 300 triliun lebih. Tapi ekuitasnya ini saya *enggak* dapat gambaran angka. Betul ini detail angkanya kita *enggak* tahu, ya, trennya seperti apa, tapi ekuitasnya kecil sekali kalau dibandingkan dengan *liabilities*-nya. Nah, apa langkah Bapak untuk memperbaiki struktur keuangan seperti kayak *gini*, ya. Ini *kan* Bapak didesak untuk investasi karena kalau *enggak*, Bapak *kan* defisit ini. Untuk itu Bapak investasi di mana-mana, nah, menghasilkan hasil dari investasi 8,41 triliun yang sebetulnya tidak cukup, tidak cukup. *Performance*-nya sebetulnya jelek Pak, *gitu*, hanya menghasilkan 8 triliun lebih, mestinya bisa lebih dari ini, berarti ada sesuatu, ya, itu yang kedua.

Yang ketiga, apa pembersihan yang Bapak lakukan? Saya yakin Dirut ini *enggak* bekerja sendiri. Budaya di Taspen ini sudah, sudah parasitik, parasit ini. Ini kalau *enggak dibersihin*, ini *kan* *enggak*, *enggak*, *enggak* hilang-hilang ini, budaya koruptif ini. Nah, sejauh mana Bapak sudah ngecek *nih*, Pak Dirut, terhadap apa yang terjadi di dalam, terhadap budaya-budaya yang harus kita kembangkan, budaya akhlak, moral, yang kita tempatkan di *ranking* pertama. Tetapi ini *kan* sudah tercemar i dengan temuan BPK dugaan 1 triliun, dugaan investasi fiktif yang dilakukan oleh PT Taspen. Ini merusak semua keluarga besar PT Taspen. Ini memalukan, Pak.

Apa langkah Bapak mengembalikan, apa langkah Bapak mengembalikan jatuhnya nama Taspen ini? Nah, ini yang kami juga *enggak* kelihatan di sini. Apa langkah selanjutnya yang harus Bapak lakukan? Nah, ini menjadi penting. Ke mana itu komisaris digaji besar-besar? Pengawasannya bagaimana komisaris? Apakah hanya tidak pernah rapat? Duduk saja? Direksi dibiarkan sebebaskan mungkin? Makanya kata berita-berita, ada orang kuat di belakangnya ini. Berita-berita lama sudah banyak beredar tetapi tetap bertahan. Nah, ini bagaimana langkah direksi yang baru, Dirut yang baru,



yang masih muda saya lihat. Yang masih umurnya mungkin baru 40-an ini saya lihat, 30-an mungkin, ya, masih muda, sehat, kuat, gagah, 32, badannya besar, tenaganya kuat untuk memberantas budaya korupsi, koruptif, parasitik yang ada di dalam Taspen. Ini harus jelaskan, ya, supaya ini tidak terjadi lagi. Jadi, itu poinnya.

Dan saat ini *kan* Bapak dalam suasana *lame duck*, bebek lumpuh ini. Banyak dipanggil *kan*, *lame duck kan* ini, *lame duck session*, ya. Apa langkah Bapak ini terhadap kayak *gini*. Nah, ini yang mohon kami disuguhi info-info dari Bapak sekalian, sehingga kami bisa lebih tahu. Kita maunya membantu Taspen *nih*, karena di, dana dari pekerja, dana dari masyarakat ada di sini. Kalau hilang kayak Jiwasraya, repot, Pak, Asabri, repot. Ini belum, belum masuk investigasi, dananya masih ada *enggak*, kita *enggak* tahu *loh* ini, dananya masih ada atau *enggak* ini. Ya walaupun *Corporate Secretary* yang lama ya, sudah ngomong ini *enggak*, *enggak* ada apa-apa. *Enggak* ada apa-apa sudah tersangka, Pak, ya, kok *enggak* ada apa-apa, *gitu*. Dua alat bukti sudah cukup.

Jadi, mohon kerja samanya dengan DPR, kalau ada butuh minta bantuan apa kasih tahu ke kami, "Pak, kami ini ada masalah ini, harus butuh *support* dari Komisi VI", ya kasih tahu, terbuka Bapak, jangan tertutup. "Enggak, biasa, bagus, bagus". Bagus, bulan depan ekuitasnya 12 T turun jadi 6 T. Bulan depannya lagi 6 T minus seperti Jiwasraya kemarin. Wah, minusnya tambah, tambah, tambah, tambah.

Nah, mohon keterbukaan Pak Dirut, kalau *enggak* Bapak bisa masalah *loh* kalau *enggak* terbuka ini. Betul. Ini *kan* sudah baru semua, ya. Saya yakin ini bawa suasana baru, akhlak moral yang baru. Sudah pelajari belum AKHLAK itu apa? Sudah dites *kan*? Ya, saya yakin sudah lulus semua. Saya berharap PT Taspen ini ke depan makin maju, begitu ya.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih dari kawan-kawan Anggota Komisi VI yang telah menyampaikan pendalaman.

Dari meja pimpinan, *gini*, Pak Dirut, sampaikan ke publik sesegera mungkin, jadi, jajaran direksi yang baru ini sudah berjalan berapa bulan?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Gini, Pak, *sorry*. Saya, Pak Feb, itu masuk bulan, eh tahun 2020.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Plt.-nya, Pak?



DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Oh, saya Plt.nya 3 bulan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tiga bulan? Ya, oke. Sampaikan kondisi secara umum memang ada kejadian hal-hal yang terkait dengan investasi di Taspen ini yang ada kecenderungan yang sekarang ke masuk ranah hukum adalah fiktif atau merugikan keuangan negara dengan penyalahgunaan kewenangan, tetapi berikan kepastian kepada publik terutama kepada para nasabah, yang intinya memang kondisinya relatif masih bisa memberikan jaminan kepada para nasabah, tidak terjadi *under funded*, tidak terjadi *under perform*, artinya defisit pembiayaan tidak terjadi walaupun ada kerugian, ya. Juga yakinkan dalam situasi menurunnya kualitas pendanaan di internal Taspen, tapi Taspen ini masih bisa bernavigasi dalam situasi yang ada. Ini yang menurut saya sekarang ini para nasabah itu banyak berbicara di, di media. Walaupun memang cukup berat, ya, situasinya, tetapi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban, PT Taspen ini dalam kaitan dana pensiun para pegawai, itu masih mampu menanganinya, ya. Kalau *toh* tidak, ya, sampaikan, tapi ada skenario 1, skenario 2, skenario 3, bahwa keberadaan PLT Dirut ini memang sebagai cara untuk mengatasi solusi. Ini yang penting supaya komunikasi publiknya bisa memberikan kenyamanan dan ketenteraman para nasabah.

Tadi saya dengarkan mulai Pak Rudi, Bu Rieke, Pak Darmadi, juga Pak Hendrik. Pak, apa *sih* sebenarnya aturan hukum yang mengatur investasi itu? Investasi itu harus dilakukan dengan cara yang seperti apa dan di mana misalnya, ya. Apakah harus dengan surat-surat berharga atau mungkin dengan investasi sektor riil? Payung hukum ini nanti atau bangunan hukumnya dan fakta hukumnya nanti akan kelihatan ini kesenjangannya, yang sekarang ini menjadi ranah pidana, yang di dalamnya potensi banyak hal mengandung unsur-unsur korupsi. Karena ini penting juga bahwa di BUMN-BUMN ini sekarang banyak melakukan investasi-investasi dengan surat berharga. Dan kalau itu mengalami penurunan nilai juga dianggap bagian daripada *loss* dalam persoalan bisnis saja.

Coba kita lihat, kita dalami, sebenarnya payung hukumnya apa? Yang, apalagi Pak Dirut Plt. juga pernah di Direksi Bagian Investasi. Nah, dalam kaitan PT Taspen ini, sekali lagi *mislead*-nya di mana, ya, mana yang betul-betul ini merupakan suatu kesadaran penuh bahwa ini main-main. Ini adalah satu usaha yang sebenarnya secara bisnis itu *enggak visibel* dan secara hukum juga menyalahi. Supaya modus semacam ini dalam bentuk investasi fiktif ini tidak terus-menerus dilakukan oleh pihak jajaran direksi yang bekerja sama dengan pihak swasta, yang dalam Panja Jiwasraya itu juga sudah terlihat bahwa pihak swasta ini tidak memiliki reputasi baik. Sama Asabri. Dan *kok* terus berulang *gitu*, *kok* terus berulang.

Kita menyelesaikan Jiwasraya dengan Panja Jiwasraya ini satu persatu kita tangani, dengan keputusan mengambil Penyertaan Modal Negara. Nah,



modus-modus semacam ini, tadi, bagaimana utang jangka menengah yang dibeli oleh Taspen dari perusahaan-perusahaan tersebut dengan harga yang, yang tinggi dari nilai pasar. Bahkan *dulu* ada perusahaan ikan arwana itu, ya, dijual dengan harga yang sangat tinggi, ya, sehingga dari selisih itulah harga tersebut kemudian setelah dijual mengalir ke kantong pribadi para petinggi, termasuk di dalam para petinggi Taspen. Inilah hal yang terkait, *kebaca* di beberapa investigasi media ada konspirasi, konspirasi yang melibatkan internal Taspen dengan pihak swasta.

Investasi fiktif ini sering dilakukan dengan tadi, saya singgung sangat rapi dan kelihatan terselubung dengan dokumen-dokumen investasi yang dipalsukan dan disembunyikan dari pengawasan internal dan eksternal, dan di situlah muncul perbuatan praktik-praktik yang sulit terdeteksi bertahun-tahun yang akhirnya meledak dalam waktu kurun tertentu. Jadi, itu yang saya tanyakan. Sebenarnya dari berbagai peristiwa ini dari pihak korporasi sendiri, apakah *sih* benarnya aturan hukum yang mengatur investasi harus dilakukan seperti apa dan di mana dan dengan siapa, ataukah hanya *common sense* bisnis saja, ya? Saya kira itu.

Terima kasih, Pak Dirut. Mohon direspons, kalau ada hal-hal yang kira-kira belum bisa disampaikan karena itu masih dalam satu proses, sampaikan saja. Ini *kan* di *live streaming*. Silakan untuk hal-hal yang terkait dengan pencerahan pada para nasabah yang saat ini terus-menerus menanyakan, termasuk kepada Komisi VI kondisi perkembangan Taspen, bisa dijawab secara langsung.

Waktu dan tempat kami persilakan.

F-P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Pak ketua, saya, saya mohon waktu tambahan sedikit boleh, Pak Ketua? Saya mohon maaf, Pak Ketua, tadi terlewat, Pak. Kalau diizinkan, saya butuh waktu 1 menit saja, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, Pak PLT Dirut dan jajaran direksi Taspen yang saya hormati,

Memang dari sisi memulihkan reputasi pasar, Taspen ini memang kalau ini perusahaan swasta pasti itu sesuatu yang sangat *urgent* sekali, sebab jika tidak, pasti bangkrut, pasti hancur, pasti hilang dari industri. Tapi karena perusahaan Bapak ini, apa namanya, punya nasabah yang *mandatory*, yang *mandatory* artinya meskipun ada skandal di Taspen dalam tanda kutip, ya, ada masalah hukum di Taspen yang sekarang ini sementara disidik oleh aparat penegak hukum, tapi *kan* tetap saja tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh apa-apa sebab itu *mandatory*.

Nah oleh karena itu, sekali lagi saya mau minta sebagai Anggota Komisi VI, di sinilah dibutuhkan memang keluhuran, kemoralitasan, dan integritas yang luar biasa daripada pengurus Taspen ini untuk memulihkan *trust* publik itu, *trust* pasar itu, *market trust* itu dipulihkan, meskipun tidak ada



implikasi apa-apa secara bisnis, karena ini *mandatory*. Mereka pasti mau *enggak* mau tiap bulan dipotong, tiap bulan dipotong, tiap bulan dipotong, enggak ada pengaruhnya, itu satu.

Dan yang kedua, Pak Ketua, saya sebagai Anggota Komisi VI, saya mau minta rapat ini juga harus merekomendasikan satu poin penting, yaitu meminta kepada aparaturnya penegak hukum, meminta kepada aparaturnya penegak hukum untuk melakukan proses penyidikan secara komprehensif terkait masalah yang terjadi di PT Taspen.

Saya kira demikian, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, Pak Dirut, untuk direspons. Kita segera mau akhiri sekitar pukul 5.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Oke, terima kasih, Pak Pimpinan.

Untuk payung hukum sendiri, investasi di Taspen itu diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, *gitu*, mana-mana saja instrumen yang boleh, *range*-nya seperti apa, itu diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, *gitu* ya. PMK Nomor 66 Tahun 2021 sama PMK Nomor 52, 52 tahun berapa? PMK Tahun, PMK Nomor 52 Tahun 2021 juga.

Dan kalau boleh, saya balik lagi ke *slide* nomor 8, yang tadi laba rugi komprehensif, boleh tolong ditayangkan. PMK Nomor 66 dan 52, 2021, itu yang 66. Berikutnya adalah PMK nomor 52 Tahun 2021 juga. Itu diperbaharui terus, Ibu, tapi terakhir yang itu, iya.

Oke, jadi *gini*, laba ruginya Taspen, jadi *gini*, kalau yang mau saya kasih tahu itu adalah aset Taspen yang menghasilkan 8,49 T, itu adalah aset Taspen dari aset yang 148 triliun.

Nah, kalau yang AIP itu asetnya jumlahnya. Oh, *sorry, sorry, sorry*, Dapatnya itu dari iuran yang tadi Ibu tanyakan. Iya, Ibu, THT, 148, 2023. Yang berikutnya deh, *sorry, slide* yang nomor 9. Nah, jadi, dari 148 T itu, hasil investasinya itu adalah, ya? Ya, oke, ya, ya, ya, *oke, oke*. Jadi, dana 148 triliun itu adalah dana THT, JKK, JKM, yang asalnya THT tadi itu dari pekerja, *gitu* ya. JKK, JKM itu asalnya dari pemberi kerja, yang tadi persentasenya sudah dipaparkan sebelumnya. Nah, dari aset 148T itu, hasil investasinya itu adalah 8,49 T atau *equal* atau sama dengan imbal hasil investasi 7,29, *gitu loh*. Nah, terus untuk yang aset akumulasi iuran pensiun atau AIP, asetnya itu adalah 229 triliun, hasilnya berapa? Iya, 4,75, iya, itu asetnya yang tadi 229 triliun, hasil investasinya itu untuk tahun 2023 adalah 15,45 triliun atau *equal* to imbal hasil investasi 7,16%, *gitu*.



Jadi, kalau tadi ada pertanyaan Pak, dari Pak Rudi tadi ya, labanya 805 miliar, itu sebenarnya laba yang asalnya dari program THT, JKK, JKM. Tadi *kan* ada premi, terus ada hasil investasi, dikurangi sama klaim, *gitu loh*. Jadi, itu labanya di bawah, jadi situ, AIP-nya tidak termasuk, *gitu*. Nah, tadi, *sorry*, Pak, yang mana? Yang AIP? Kalau AIP itu *kan* sebenarnya dana titipan, Pak. Buku kita *tuh* hanya THT, karena itu hasil pengembangannya diakumulasi terus, sebenarnya. Jadi, akumulasi ke saldo aset terus, *gitu loh*. Jadi, yang laba itu *cuman* yang di program yang sebelah kiri *aja*, THT, JKK, JKM. Nah, tapi hasil investasinya itu kita catat 15,4 triliun tadi, Pak, dari aset yang 229 tadi, *gitu*.

Nah, untuk berikutnya tadi pertanyaan dari Bapak Darmadi, mengenai kronologis sama modus itu Pak, ya. Kita hanya bisa menduga-duga saja di sini, Pak, karena ya sebagai, sebagian dari kita *nih* orang di *market* ya kita bisa tahulah modus seperti apa, *gitu* ya. Cuma sampai saat ini *kan* masih dalam penyidikan oleh KPK, *gitu*. *Even* sampai minggu lalu, minggu ini juga ada beberapa orang eks pejabat di Taspen itu yang diminta keterangan, *gitu kan*. Jadi, makanya *kayaknya* kita belum bisa lebih lanjut menjawab, Pak, mengenai kronologi sama modus, karena itu kejadian juga di tahun 2019, kami belum ada di situ. Kalau kita *ngelihat* dokumentasi kronologis, ya, hanya dugaan saja *kan*, karena *kan* kita juga *enggak* tahu *nih* siapa, mana yang benar, *gitu kan*.

Iya, iya, iya, jadi, jadi memang kalau, kalau itu, paling *enggak* sekarang kita sudah ada langkah-langkah mitigasilah, paling *enggak*.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Interupsi, Pimpinan.

Maaf, ya Pak, ya. Tadi dijelaskan bahwa kasus itu 2019, ini kedua kali *loh* Bapak bilang “Saya belum ada di situ baru masuk di 2020 sebagai Direktur Investasi”, sebelumnya Bapak di mana?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Sebelumnya? Saya 5 bulan 2 minggu di Asabri. Waktu Asabri mulai

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Sebelumnya di Asabri? Oh, tapi menurut saya, Pak, ketika, ini *kan* modusnya kurang lebih ada hal-hal yang saya kira sama lah, kenapa saya bilang sama, karena asuransi sosial, Pak. Bapak *kan* dari asuransi Asabri itu juga potongan upah *loh*.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Iya.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):



Iya, jadi asuransi sosial. Menurut saya *nih*, Pak, ada baiknya sebelum masuk ke Direktur Investasi itu *kan* pasti ada, ada laporan *dong*. Laporan dari kinerja sebelumnya. Atau tidak ada?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Ada, ada, ada kinerjanya.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Ada kinerjanya. Nah oleh karena itu, saya kira, Pimpinan, katakanlah ini manajemen baru semuanya, ya, tapi saya *enggak* yakin yang di belakang juga atau yang investasi itu diganti semua. Pasti ada yang tahulah. Karena itu jawaban tadi, jadi saya saya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pasti, pasti.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Mohon maaf nih, saya *enggak* menerima jawaban, tidak bisa menerima jawaban "Saya belum ada di sana", karena sebelum Bapak menerima jabatan seharusnya *kan* Bapak menelisik *dulu* bagaimana pemetaan masalah yang ada di bidang kerja Bapak, *gitu*. Ya, saya *enggak* tahu, mungkin karena Bapak masih muda, ya.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Enggak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Cukup dulu, ya, *anu* biar direspons Pak Dirut dulu.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Oke, jadi memang ini *kan* investasi yang ditengarai, yang sedang disidik oleh KPK ini adalah investasi di reksa dana, *gitu kan*. Reksa dana *open end* dan itu laporan ke kita itu berupa laporan NAV atau *Net Asset Value* saja. Naik turunnya, dalamnya seperti apa, itu itu kita sebenarnya *enggak* bisa tahu, *gitu*, *cuman* akhirnya kita minta juga *portofolio valuation report*-nya atau PVR-nya seperti apa dan di situ ya kita bisa menduga-duga *sih*, Bu. *Cuman* yang tadi saya utarakan bahwa respons dari kita nantinya akan tertulis dan tertutup karena ini sedang dalam penyidikan oleh aparat hukum.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, seolah-olah kelihatan menghindar, Pak.



DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Oh, *enggak, enggak, enggak* menghindar, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nah, saya akan selesaikan masalah itu sebagai direktur saat ini, ya.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Siap.

Kami ini *sih*, kami berniat terbuka *cuman* responsnya itu nanti tertulis dan tertutup.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, nanti tertulis.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Sorry?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak, masih ada lagi *enggak?*

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Kronologisnya boleh.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Pak, cukup, Pak. Cukup, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tertutup nanti, ya.

Pak, ini di forum yang ditunggu-tunggu. Yakinkan bahwa skandal korupsi di Taspen itu disadari bahwa memang terjadi kerugian. Tapi yakinkan dalam forum ini bahwa kerugian-kerugian finansial yang dialami oleh PT Taspen akibat investasi fiktif atau investasi yang menyebabkan kerugian perusahaan ini tidak mengganggu kelangsungan program-program jaminan sosial yang juga masih menjamin hak-hak para peserta, Pak.

Silakan.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Ya, dengan apa, dengan kasus yang sedang menimpa Taspen, terutama kepada mantan Direktur Utama PT Taspen, *gitu* ya. Kami di sini bisa meyakinkanlah kepada para peserta kami, bahwa hak-haknya itu bisa tetap kami bayar *gitu*, Pak. Baik itu, iya baik itu JHT, JKK maupun JKM, *gitu*, karena, *gimana* ya, satu apa namanya, satu kejadian yang yang yang terjadi, *gitu* ya, memang sekarang masih masih dalam penanganan masalah penegak hukum tapi aset-aset investasi kami yang lain itu sebenarnya *relatively* masih masih inilah, masih apa namanya, masih sehat *gitu*. Terbukti dari *rating* yang diberikan oleh lembaga pemeringkat bahwa kondisi kami sebenarnya masih sehat *gitu*, ya, terutama aset investasinya dan layanan kami juga sebenarnya tidak ada terganggu, *gitu*. Dan kami meyakinkan kepada para peserta kami bahwa hak-haknya, baik itu, saya ulangi lagi ya, hak-haknya baik itu THT, JKK, JKM *Insha* Allah tidak terganggu, Pak, *gitu*. Terima kasih, Pak Pimpinan.

Kualitas hasil investasinya sendiri untuk THT dan AIP *relatively* bagus, Pak, bagus, karena kalau kalau misalnya, kalau misalnya kita, kita *ngelihat* ya, apa, *yield of investment* kita juga juga masih di atas rata-rata *market*, *gitu* ya, rata-rata industri. Kalau tadi Pak Pimpinan bilang, Dapen sekitar 6,5-6,9, kita, kita masih di atas itu. Untuk aset kita itu memang kebanyakan besar itu di Surat Berharga Negara, SBN, SBSN, *corporate bond* juga, yang *rating*-nya kita mengacu sama PMK. Dan dari instrumen itulah sebenarnya kita yang *making money sih*, Pak, *gitu*.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Pak, tadi ada jawaban yang perlu *sih*, maaf, izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, bisa disampaikan.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Sedikit saya mohon jawaban langsung di sini. Nah, hasil investasinya *kan* tadi *tuh* ada 148 triliun dari yang potongan dari sumbernya adalah tabungan hari tua, ya, preminya. Itu akumulasi Tabungan Hari Tua, JKK, dan JKM, begitu, diinvestasikan menghasilkan 7,29 T, Pak, ya?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Itu 7,29%.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

7,29%.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Hasilnya 8,49, Bu.



F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

8,49 T?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Iya, iya.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Kemudian yang uang pensiun, yang itu adalah akumulasi preminya pekerja yang 4,75%, 229 triliun?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Itu asetnya.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Diinvestasikannya berapa?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Hasil investasinya 15,45.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

15,45 T atau koreksi kalau saya salah, 6,75%, salah?

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Enggak, 7,1%, imbal hasilnya.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

7,1%? Nah, intinya apakah peserta yang sebetulnya uangnya diinvestasikan tadi, baik dari THT maupun dari pensiun, apakah mendapatkan hasil investasi itu? Imbal baliknya, hasil pemupukan itu.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Nah, kalau, kalau kita *kan* skemanya masih manfaat pasti, sebenarnya, ya *kan*, pasti dapat.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya kira nanti diuraikan.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):



Nanti tolong dirinci saja, Pak, ya.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Boleh, boleh nanti kepanjangan soalnya.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Karena ini juga ada keluhan dari pensiunan-pensiunan, angkanya itu sebetulnya ketika sekarang sudah masuk pensiun, apakah itu layak untuk mereka hidup ketika masa pensiun, penting loh. Saudara-saudara juga nanti pensiun sama seperti kami.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi, yang ditanyakan, imbal balik itu apakah juga didapat para peserta, nanti diuraikan.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Nanti, nanti dalam jawaban tertulis kami, Pak, kita *detailin* saja deh berapa persen, *gitu*, ya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, nanti diuraikan saja jawaban tertulis atau nanti kita lanjutkan dalam pertemuan tertutup, Pak. Iya, intinya bahwa investasi ke depan atau saat ini yang masih ada, terus dilakukan dengan cara yang transparan, menjunjung tinggi prinsip transparansi, dan akuntabilitas, Pak, ya. Pernyataan tadi penting untuk disampaikan, supaya kepercayaan masyarakat publik terhadap Taspen yang saat ini menurun itu bisa pulih kembali, yang sangat berdampak pada minat ASN untuk mengikuti program-program yang dikelola oleh Taspen, ya.

Pernyataan Pak Dirut tadi penting disampaikan dan saya mengucapkan terima kasih, walaupun belum semuanya bisa dijawab secara tuntas, karena ada hal-hal yang masih perlu proses, dan memang tidak bisa disampaikan secara terbuka. Tapi DPR tetap akan mengadakan terus rapat-rapat sebagai fungsi pengawasan kami, terkait dengan persoalan di PT Taspen. Untuk itu, rapat ini akan mengambil keputusan atau kesimpulan sementara, yang akan saya bacakan.

1. Komisi VI menerima penjelasan kinerja korporasi 2023 dari PT Taspen serta mendorong PT Taspen untuk meningkatkan kinerja korporasi pada periode selanjutnya.

Menerima penjelasan ini termasuk hal-hal yang terkait dengan situasi saat ini, ya, tetap tadi dikatakan tentang dampak terhadap peserta Taspen, juga berbagai hal pelajaran yang bisa diambil dari



peristiwa-peristiwa yang ada saat ini, ya. Juga bagaimana keinginan upaya pemberantasan masalah-masalah korupsi di PT Taspen dengan transparansi dan akuntabilitas hal yang terkait dengan investasi, juga bagaimana inovasi layanan digital yang sekarang ini ditingkatkan, juga tantangan dan peluang ke depan itu seperti apa, yang diuraikan oleh Pak Dirut. Intinya kami menerima penjelasan itu dengan berbagai catatan yang ada, bisa disetujui ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Kemudian, Komisi VI DPR RI meminta PT, meminta PT Taspen untuk melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko investasi secara tepat dan optimal dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kasus investasi fiktif tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Gimana, Pak Dirut, Oke? Jajaran Direksi, oke? Teman-teman, oke, ya?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI meminta PT Taspen untuk meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* secara konsisten.

Untuk lebih meyakinkan para nasabah.

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI akan meminta kepada Kementerian BUMN untuk melakukan pemilihan Direktur Utama dan Direksi PT Taspen secara berhati-hati sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dengan memperhatikan integritas serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pak Bangun, ya? Pak Dirut, ini lebih ranah kita, akan kita bawa ke rapat dengan Menteri BUMN. Rapat dengar pendapat adalah bagian masukan berbagai hal, terkait informasi *permasoalan* pada Komisi VI, yang itu merupakan bahan rapat kita dengan Menteri BUMN. Kesimpulan nomor empat ini akan kita bawa pada rapat kerja dengan Menteri BUMN.

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi VI DPR RI mendorong PT Taspen untuk menjelaskan perbaikan yang akan dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Sek, sek, sek, sek. Enggak, ini bagian 5 6 ini satu kesatuan kali?



Komisi VI DPR RI mendorong PT Taspen untuk menjelaskan perbaikan yang akan dilakukan untuk mengembalikan, ya, maksudnya rencana-rencana, ya? *Hah?*

Komisi VI mendorong PT Taspen untuk menjelaskan perbaikan yang akan dilakukan untuk perbaikan masyarakat, ya, skenario-skenario perbaikan.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Untuk menyampaikan skenario.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, Komisi VI mendorong PT Taspen untuk menyampaikan. Meminta PT Taspen untuk, meminta PT Taspen, untuk menyampaikan penjelasan skenario-skenario perbaikan, itu, ya, yang akan dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan pada masyarakat. *Cocok?*

Skenario-skenario perbaikan yang, skenario perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Cocok, Pak Dirut? Ya, supaya pulih kembali kepercayaan, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan perbaikan kerja, dan memperbaiki kinerja, dan perbaikan kinerja.

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi VI DPR RI meminta pada PT Taspen untuk menjelaskan secara tertulis terkait:

a. Mekanisme penentuan Komite Investasi PT Taspen beserta dasar hukumnya.

Pak Dirut, tertulis, ya, karena ini tidak mudah disampaikan juga ke publik.

b. Mekanisme investasi PT Taspen sebagai asuransi sosial dan pensiun.

Atasnya sudah? Beserta dasar hukumnya, benar? B, ini Bu Rieke ini. Merumuskan, ya? Ya,

menjelaskan terkait mekanisme investasi PT Taspen sebagai asuransi sosial dan pensiun beserta dasar hukumnya.



Oke, Pak Dirut? Kalau *enggak* realistis kesimpulannya di, realistis ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Komisi VI DPR RI meminta pada PT Taspen untuk menjelaskan secara tertulis terkait dengan:

c. Proses pemberian imbal hasil kepada peserta.

Tertulis, ya? Oke? Investasi, oh, imbal hasil investasi, ya.

d. kronologis dugaan investasi fiktif yang terjadi pada PT Taspen.

Ini kalau *enggak* tertulis, ya...

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Kata-kata, apa namanya, kronologisnya ini *kan* berhubungan, masih berhubungan sama ini, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ini *kan* sudah masuk wilayah hukum, tapi sepengetahuan dari Pak Dirut, bisa *enggak*? Sepengetahuan.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Iya, *sih*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, nanti kita, kita dijelaskan saja di FGD, Pak, *enggak* usah tertulis, karena ini juga

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Boleh, boleh.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya *kan*. *Kan* tertutup kalau FGD.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Iya, *oke*, kalau kalau, kalau itu *oke/ah*, itu *oke*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):



Kronologis dugaan investasi fiktif yang terjadi di PT Taspen, dengan catatan ini, ini dalam rapat tertutup ke depan, ya.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Nah, itu boleh.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Karena kita paham. Belum tentu, nanti kalau *ngomong* keliru malah jadi kasus hukum juga *kan, gitu* kan. Tapi dugaan untuk dijelaskan secara tertutup dengan Komisi VI, dengan catatan ini rapat tertutup dalam forum FGD.

Tujuh, masih ada *enggak*?

7. Komisi VI DPR meminta kepada PT Taspen untuk dapat memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Yang tertulisnya pun yang, yang kira-kira memang perlu sampai ke kita Pak, kalau *enggak* perlu yang itu masih dalam wilayah korporasi dan memang belum bisa terbuka, jangan disampaikan juga, karena itu dokumen.

Terima kasih saya ucapkan kepada PLT Direktur Utama dan Direktur Investasi PT Taspen beserta jajarannya, yang telah menyampaikan paparannya dan juga penjelasan dari pendalaman Anggota Komisi VI. Dan juga pada Kawan-kawan Anggota Komisi VI, yang sehari ini dari jam 10.00 kita belum bergeser, rapatnya terus berlanjut. Saya ucapkan terima kasih yang telah, apa, dengan sabar ikut rapat, karena ini masalah persoalan rakyat dan ditunggu publik terkait dengan PT Taspen.

Maka sebelum saya menutup rapat hari ini setelah mengambil kesimpulan, kami akan beri kesempatan kepada Pak Dirut PLT untuk memberikan *closing statement*.

DIREKTUR UTAMA PT TASPEN (RONY HANITYO APRIANTO):

Oke, terima kasih, Bapak Pimpinan.

Saya mewakili teman-teman di Direksi Taspen mengucapkan terima kasih atas undangannya. Dan kami akan memberikan jawaban tertulis sebagaimana tadi yang kami utarakan, dalam waktu 5 hari kerja. Dan ada beberapa informasi juga yang akan kami sampaikan, selanjutnya tadi ya, mengenai dugaan investasi yang bermasalah tersebut di Taspen.

Sekali lagi, terima kasih banyak atas undangannya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan kata-kata yang saya pilih, karena sesungguhnya kesalahan itu



datang dari saya dan kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnyanya dari yang di atas.

Wassalamualaikum warahmatu, hah?

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada jajaran direksi, ada Pak Roni, ada Bapak Aryadi, ada Ibu Ovita, ada Bapak Feb Sumandar, ada Ibu Retno Lasmipuri, ada Ibu Dianti Susilowati.

Kepada seluruh Kawan-kawan Anggota Komisi VI, sekali saya ucapkan terima kasih. Dengan *closing statement* Pak Dirut Plt., Pak Rony, maka kita akhiri rapat pada hari ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.13 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.

NIP. 197104071992032001

